

**Negara Republik dan Jaminan Publisitas:
Menimbang Etika Politik Immanuel Kant dalam *Zum Ewigen Frieden***

Tesis ini untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Magister
Program Studi Magister Filsafat

Kepada



Diajukan Oleh

Melny Nova Katuuk

200201009

**PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

Jakarta, 1 Oktober 2023

Negara Republik dan Jaminan Publisitas:
Menimbang Etika Politik Immanuel Kant dalam *Zum Ewigen Frieden*

Yang dipersiapkan dan diajukan oleh:

Melny Nova Katuuk

NIM: 200201009

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal

10 November 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat

Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi

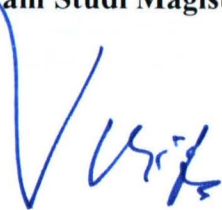
Pembimbing Pendamping



Dr. Hieronimus Y. Dei Rupa

Disahkan pada tanggal 24 Januari 2024

Ketua Program Studi Magister Filsafat



Prof. Dr. J. Sudarminta

Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara



Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi

PERNYATAAN

Atas dasar keyakinan bahwa dalam karya-karya akademik, kejujuran adalah hal yang paling penting dalam etika menulis. Hal ini selaras dengan cita-cita filsafat yang dikembangkan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, yakni terus memaknai kebenaran dengan berupaya menghadirkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, maka penulis ingin memastikan bahwa naskah tesis ini telah melalui diskusi yang panjang dengan dosen pembimbing untuk menghadirkan tulisan yang orisinal dalam upaya mengembangkan filsafat politik Kant.

Maka dengan ini, saya menyatakan bahwa **dalam tesis ini tidak terdapat teks**

1. Yang pernah diajukan sebagai karya tulis, atau sebagai bagian karya tulis, di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan, atau
2. Yang sudah pernah dipublikasi, atau
3. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu diberitahukan dalam catatan tertulis terhadap teks itu dan tulisan itu, apabila sudah dipublikasikan, disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 14 Juni 2023

Melny Nova Katuuk

Kata Pengantar

Tesis ini bermaksud menggeluti perkara-perkara politik yang muncul dalam negara republik-demokratis. Jika melihat arah demokrasi akhir-akhir ini, banyak yang meragukan kesaktiannya lagi. Demokrasi menjadi korosif tetapi terus dibebankan untuk mengatasi segala macam persoalan politik dalam ruang publik kita. Untuk masuk dalam diskusi politik republik-demokratis, tesis ini memeriksa secara seksama ajaran dari filsuf *Aufklärung*, Immanuel Kant. Apakah ajaran etika politik Kant dalam republikanisme dapat diadili di hadapan akal budi dan dipertanggungjawabkan dalam memberikan dasar bagi etika politik yang lebih baik saat ini? Dalam tesis ini, saya tidak bermaksud memberikan jalan keluar dari setiap persoalan politik yang mendiami ruang publik kita, sebaliknya tesis ini membuka percakapan kritis di seputar perdebatan politik saat ini, dan di waktu yang sama mengundang komunitas politik menyelesaikan berbagai keretakan politik dengan kebeningan nurani.

Tesis ini memuat serangkaian pemikiran etika politik Kant dan para pemikir tata negara yang membentang dari zaman Hobbes, Locke, Rousseau sampai saat ini. Kiranya boleh dikatakan bahwa tesis ini juga menyajikan sejarah politik selama sekitar enam abad.

Atas selesainya tesis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada STF Driyarkara, PERUATI Jabodetabek, Komunitas Sekolah Agama (KSA), dan Irene Nainggolan (teman diskusi yang banyak memberikan insiprasi dalam mengembangkan tesis ini.) Ucapan terima kasih tak terhingga kepada dosen pembimbing saya, Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi. Tilikan kritisnya dalam skripsi ini telah membangun kesadaran tentang pentingnya memperhatikan unsur-unsur teknis dalam penulisan serta membuka perspektif baru dalam memahami lebih utuh lagi tentang Kant dan permasalahan filsafat politik di sekitar kita.

Melny Nova Katuuk

[A] Melny Nova Katuuk (200201009)

[B] Negara Republik dan Jaminan Publisitas: Menimbang Etika Politik Immanuel Kant dalam *Zum Ewigen Frieden*

[C] i+102 hlm; 2023; Catatan kaki

[D] **Kata-kata kunci:** Negara, Republik, Publisitas, Kritik, Etika, Politik, Immanuel Kant, Moral, Imperatif Kategoris, Hak, Hukum, Demokrasi, Ruang Publik, Kepublikan.

ABSTRAK

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menjabarkan dan memahami etika politik Kant yang dilandasi oleh dua prinsip etis, yaitu republik dan publisitas dalam bukunya *Zum Ewigen Frieden: Ein Philosophischer Entwurf* (Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofi, 1795). Sebagai pemikir konstruksivisme, Kant berhasil membangun bentuk baru pemerintahan emansipatoris sayap kiri yang mengusung nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan. Bentuk pemerintahan republik menekankan pada legitimasi etis dengan cara mempersoalkan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Selain itu, pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan perwakilan yang dilandasi oleh konstitusi dan hak asasi manusia sehingga memungkinkan representasi publik. Tetapi prinsip ini tidak dapat menghadirkan keadilan tanpa adanya prinsip kepublikan karena kepublikan membuka ruang publik seluas-luasnya terhadap komunikasi rasional. Oleh karena itu, manakala bentuk pemerintahan republik adalah sebuah prinsip yang berfokus mengatasi kesewenangan kekuasaan pemerintah/rakyat, publisitas adalah prinsip yang meminimalisir ketidakpedulian warga atau sebaliknya: menampung seluruh aspirasi warga. Dengan adanya dimensi diskursus intersubjektivitas yang dimungkinkan pada ruang-ruang publik politis, visi republik dan publisitas ini dengan demikian memiliki gagasan misioner: Pemerintahan republik dapat menjadi sistem pemerintahan yang dapat mencegah totalitarianisme. Maka ada satu piranti yang dapat menyangga kemajuan struktur republik dan publisitas, yaitu warga negara atau pelaku politik yang berbudi luhur.

[E] 11 Sumber utama, 38 sumber pendukung (1970-2022)

[F] Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi

DAFTAR ISI

Contents

Contents

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tesis yang Diajukan.....	4
1.4 Tujuan Penelitian dan Penulisan	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Ruang Lingkup dan Pembatasan.....	5
1.7 Metode Penulisan.....	5
1.8 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
KANT: RIWAYAT HIDUP DAN ETIKA	7

2.1 Pengantar	7
2.2 Sketsa Kehidupan Kant.....	7
2.3 Menghadirkan Etika Kant	11
2.3.1 <i>Kritik der reinen Vernunft</i> (1781) dan <i>Kritik der praktischen Vernunft</i> (1788)	12
2.3.2 Etika	13
2.4 Moralitas.....	15
2.4.1 Antara Kehendak Baik dan Bertindak demi Kewajiban	17
2.4.2 Kewajiban versus Kecenderungan.....	18
2.5 Prinsip Tertinggi Moralitas	20
2.5.1 Imperatif Kategoris versus Imperatif Hipotetis.....	20
2.5.2 Rumusan Pertama Imperatif Kategoris: Hukum Umum.....	22
2.5.3 Rumusan Kedua: Manusia sebagai Tujuan	23
2.5.4 Rumusan Ketiga: Otonomi Kehendak.....	24
2.6 Kesimpulan	26
BAB III.....	28
SEKITAR ETIKA POLITIK KANT	28
3.1 Pengantar	28

3.2 Horizon Sejarah: Hobbes, Locke, dan Rousseau	28
3.3 Thomas Hobbes	29
3.3.1 Manusia: Kondisi Alami dan Ketakutan akan Kematian.....	29
3.3.2 Kontrak Sosial: Menuju “Sang Monster Leviathan” (Negara).....	31
3.4 John Locke.....	34
3.4.1 Hukum Ilahi dan Hukum Kodrat.....	35
3.4.2 Hak Milik	35
3.5 Jean-Jacques Rousseau.....	36
3.5.1 Negara sebagai Kehendak Umum Rakyat.....	38
3.5.2 Kebangkitan Republikanisme: Pencerahan dan Revolusi Prancis	40
3.6 <i>Zum Ewigen Frieden</i>	45
3.7 Kesimpulan.....	47
BAB IV	48
DUA PRINSIP ETIS: REPUBLIK DAN PUBLISITAS	48
4.1 Pengantar	48
4.2 Hak (<i>Recht</i>)	48
4.3 Hak dan Hukum: Menuju Negara Berkeadilan	49
4.3.1 Dari Kontrak Sosial Menuju Republik.....	54

4.3.2 Konsep Dasar Republikanisme dan Kebangkitannya.....	56
4.3.3 Republikanisme: Melampaui Rousseau	58
4.4 Konstitusi Republik: Pemerintahan Legitim	61
4.4.1 Kewarganegaraan: Antara Warga Negara ‘Aktif’ dan Warga Negara ‘Pasif’	63
4.4.2 Antara Republik dan Demokrasi.....	64
4.5 Kepublikan.....	65
4.5.1 Definisi dan Lintasan Publisitas	66
4.5.2 Kepublikan: “Yang Idea”	67
4.5.3 Kepublikan dan Institusi.....	70
4.5.4 Perdamaian Abadi: Sebuah Cita-Cita.....	71
4.6 Kesimpulan.....	74
BAB V	75
MENIMBANG KANT	75
5.1 Pengantar	75
5.2 Republikanisme dan Kepublikan: Sebuah Rangkuman.....	76
5.3 Beberapa Keberatan terhadap Kant.....	81
5.3.1 Menimbang Negara Kant: Pengakuan Total terhadap Hak Milik.....	81
5.3.2 Dari Etika Kewajiban Menuju Politik Liberalisme: Menimbang Kant	82

5.4 Etika Politik Kant dan Keindonesiaan.....	85
5.5 Kesimpulan.....	90
BAB VI.....	91
PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corak pemerintahan demokrasi masih dipandang sebagai sistem pemerintahan terbaik saat ini. Sekitar 25 tahun yang lalu, ilmuwan politik, seperti Francis Fukuyama, pernah mendeklarasikan dalam bukunya *The End of History*, sebuah tesis berani. Dalam tesis tersebut Fukuyama menanggapi pertemuan ambigu antara demokrasi dengan politik pasca perang dingin abad ke-20: bahwa sejarah konflik ideologi telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet, dan dunia hanya menyisakan satu bentuk kekuatan tanpa tanding, yakni liberalisme demokratis. Model Barat ini digadang-gadang sebagai mesin rasional yang akan melakukan kontrol politik dan ekonomi berdasarkan prinsip hak milik dan dominasi pasar.¹ Fukuyama segera dicela karena deklarasinya itu, sebab meskipun perang dingin dianggap usai, para ilmuwan politik lainnya menilai bahwa konflik geopolitik akan terus berlanjut selama beberapa dekade ke depan.

Demokrasi memang bukan tanpa tanding, tapi bukan tanpa kritik. Salah satu komentar Herry Priyono tentang demokrasi di Indonesia cukup membuat melek atas situasi politik saat ini, “demokrasi telah menjadi istilah untuk membenarkan apa saja, dari penyebaran *hoax* hingga tribalisme politik dari sentimen agama.”² Studi yang dilakukan oleh ilmuwan politik Roberto S. Foa dan Yascha Mounk di AS menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat AS terhadap lembaga demokrasi. Menurut mereka, hampir seperempat warga AS yang berusia antara 16 sampai 24 tahun setuju untuk tidak mendukung demokrasi karena demokrasi dinilai sebagai sistem atau cara paling “buruk” dalam menjalankan negara.³ Tetapi fakta ini belum dapat mematahkan klaim utama

¹ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, (New York: Free Press, 1989), hlm. 16:3–18, 3.

² Herry Priyono, “Demokrasi”, (Bahan Kuliah Matrikulasi STF Driyarkara, 2019), hlm. 55.

³ Yascha Mounk, *The People Vs. Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save It* Cambridge: Harvard University Press, 2018, hlm. 105.

Fukuyama bahwa dalam pemikiran politik Barat, demokrasi tidak memiliki penantang di arena permainan global. Bagi Fukuyama, satu-satunya penantang demokrasi yang tersisa adalah fundamentalisme Islam dan kapitalisme gaya Cina dan Rusia.

Dalam sejarah Indonesia, nomenklatur politik demokrasi telah dikenal dengan berbagai istilah sejak 1945: Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila, Masa Orde Baru (1965-1998), dan Demokrasi Reformasi (1998-sekarang). Tetapi demokrasi di Indonesia tidak pernah mulus karena di masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto, demokrasi kehilangan jangkarnya. Mengapa? Karena rezim Soeharto hanya memakai nama pemerintahannya sebagai pemerintahan demokrasi, tetapi faktanya pemerintahan Orde Baru diarahkan pada sistem otoritarianisme. Sampai saat ini, memang demokrasi di Indonesia belum memberikan signifikansi yang memuaskan dalam pemerataan ekonomi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan politik, tetapi demokrasi masih dianggap pemerintahan paling baik.

Tesis ini bukan untuk menentang demokrasi, juga bukan untuk menggusur nilai demokrasi sebagai landasan utama legitimasi politik. Menurut hemat saya, daya politik di Indonesia masih berat sebelah, semata-mata bertumpu pada kesaktian demokrasi. Masalah ini yang tidak kita sadari. Demokrasi dibebani untuk menyelesaikan segala rupa paradoks yang menghuni ruang publik kita. Demokrasi yang kita muliakan ini sebenarnya bukan prinsip satu-satunya yang dimiliki bangsa Indonesia karena demokrasi saja tidak bisa menjawab tantangan Indonesia. Apa yang kurang dipahami dengan baik adalah bahwa demokrasi tidak memuat sistem yang lengkap dengan piranti etika di dalamnya, padahal persoalan politik bukan hanya masalah pragmatis tanpa selera moralitas. Tanpa kehendak moral dan sikap batin, yang mau berdamai untuk mencari keadilan atas berbagai konflik di Indonesia, akhirnya kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bergantung pada untung rugi para elit negara.

Penting untuk merehabilitasi politik di Indonesia dengan memaknai prinsip republik dengan legitimasi etis yang dimilikinya. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, para *founding fathers* telah menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, seperti yang dikatakan Mohammad Hatta. Hatta mengakui bahwa republik adalah asas utama sebuah pemerintahan yang baik, tetapi ia tidak dapat berjalan sendiri. Republik mesti

digerakkan oleh sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan perwakilan yang kekuasaannya dibatasi, sehingga dapat menjalankan sistem politik pemilihan berkeadilan.

Republik-demokratis adalah bentuk pemerintahan yang dipilih rakyat Indonesia berdasarkan kehendak umum atau kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan republik yang demokratis dianggap dapat memberikan dasar tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan prinsip kolektif yang dijalankan atas dasar pertimbangan prinsip-prinsip moral. Republik datang dengan seperangkat etika dan sejarah yang panjang. Republik demokrasi di Indonesia dilahirkan untuk terus ada dalam tegangan antara otoritas negara dan kebebasan rakyat, dan tegangan antara politik-ekonomi.

Tesis ini menghadirkan kajian etika politik Immanuel Kant tentang republik dan jaminan publisitas yang dimuat dalam bukunya *Zum Ewigen Frieden: Ein Philosophischer Entwurf* (*Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofi*, 1795). Kedua prinsip ini sekaligus memberikan kepada kita cara berbeda untuk merumuskan refleksi moral negara modern yang digempur dengan persoalan kapitalisme, radikalisme, persoalan komunal dan global. Republik dan publisitas pada Kant secara khusus membahas konjungtur historis yang memunculkan teori republikanisme. Tetapi juga menyelidiki sejarah bagaimana pertemuannya yang ambigu dengan lingkungan intelektual Jerman di era Pencerahan dan Revolusi Perancis, abad ke-17, yaitu momen 'antitotaliter', yang mendasari dua kemungkinan interpretasi ini.

Sumbangan utama Kant dalam republikanisme adalah bahwa ia telah membangun konsep negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menjembatani moral (imperatif batin/norma batiniah) dengan hukum (norma lahiriah) dalam ranah politik praktis.⁴ Dalam *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (*The Groundwork for the Metaphysics of Morals*, 1785) imperatif kategoris adalah aturan tertinggi untuk tindakan deliberatif manusia yang diaplikasikan Kant dalam etika, politik, dan agama.⁵

⁴ S.P. Lili Tjahjadi, "Kepublikan dalam Filsafat Kant" dalam *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*, ed. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 79.

⁵ Sally Sedgwick, *Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals: An Introduction*, New York: Cambridge University Press, 2008, hlm. 99.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan alasan pemilihan judul di atas, tesis ini hendak mempertanyakan masalah-masalah politik di seputar pemikiran Kant dan pengaruhnya dalam politik kontemporer. Pertama, apa yang menjadi landasan etika politik Kant dalam membangun konsep tata negara? Kedua, apakah gagasan pemerintahan republik dan prinsip kepublikan dapat membangun pemerintahan setara, bebas dan mampu mengolah tegangan antara kebebasan warga dan otoritas negara? Ketiga, kebaruan apa yang ditawarkan etika politik Kant dalam merespons sejumlah tantangan politik kontemporer?

1.3 Tesis yang Diajukan

Menurut Kant semua manusia berbudi taat pada hukum moral sebagai imperatif kategoris, yang termanifestasikan dalam ketaatan pada hukum negara. Oleh karena itu negara harus menghadirkan kebebasan warga sekaligus menetapkan otoritasnya dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan benar. Berdasarkan tesis Kant tersebut, saya berpendapat bahwa prinsip etis dalam etika politik Kant, yaitu republik (pemerintahan perwakilan) yang mengandaikan kepublikan dapat menghidupi tegangan antara kebebasan warga dan otoritas negara dalam mengatur dan mengelolah pemerintahan, sehingga negara mampu menghadirkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan perdamaian.

1.4 Tujuan Penelitian dan Penulisan

Penelitian dan tulisan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar magister di STF Driyarkara
2. Untuk memperlihatkan bahwa bentuk pemerintahan republik dan kepublikan Kant adalah prinsip-prinsip penting dalam menuju negara demokrasi modern.
3. Untuk menunjukkan pentingnya pembentukan struktur-struktur hukum dan demokrasi yang menekankan publisitas dalam ruang publik.
4. Untuk memberikan sebuah perspektif baru dalam menghadapi tantangan kemerosotan demokrasi modern di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan:

1. Mengembalikan diskursus moral ke dalam bangunan politik dan demokrasi.
2. Memperkaya refleksi filsafat politik terhadap fenomena-fenomena negara, hukum, moral dan publisitas.

3. Menunjukkan pentingnya dimensi moral dalam politik praktis negara modern.

1.6 Ruang Lingkup dan Pembatasan

Ada dua hal yang menjadi pembatasan dalam tulisan ini. Pertama, untuk membahas etika politik Kant yang maha luas itu, maka etika politik yang akan dibahas dalam tulisan ini secara khusus mengkaji konsep negara republik dimana hukum dan moral ada dalam irama diskursus intersubjektif, yakni publisitas. Kedua, pemikiran Kant tentang negara republik dan kaitannya dengan publisitas berkaitan erat dengan kewajiban tentang hukum moral sebagai imperatif kategoris. Dengan demikian, tulisan ini tidak akan membahas terlalu banyak epistemologi Kant, meskipun etika Kant juga memiliki keterkaitan dengan pembahasan Kant tentang epistemologinya. Tulisan ini juga tidak akan banyak membahas perdebatan liberalisme dan komunitarianisme, meskipun Kant banyak dibahas dalam perdebatan tersebut.

Mengingat pemikiran Kant tentang etika politik berada dalam seluruh bangunan filsafat yang tercecce dalam berbagai tulisannya, maka untuk membahas etika politik Kant, saya akan berfokus pada bukunya, *Zum Ewigen Frieden: Ein Philosophischer Entwurf* (Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofi, 1795). Tetapi, hanya beberapa gagasan pokok saja dalam buku ini yang sekiranya relevan dengan tesis ini, yang akan saya bahas. Selanjutnya, pembahasan etika Kant tentang imperatif kategoris, akan ditelaah dari bukunya *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (*The Groundwork for the Metaphysics of Morals*, 1785). Alasannya, karena *Grundlegung* adalah semacam rangkuman tentang etika Kant yang terdapat dalam *Kritik der praktischen Vernunft* (*Kritik of Practical Reason*, 1788).

1.7 Metode Penulisan

Metode yang dipakai dalam proses penulisan atau penelitian adalah metode kepustakaan. Sumber primer yang menjadi acuan dalam tulisan ini adalah karya Kant dalam bukunya, *Zum Ewigen Frieden: Ein Philosophischer Entwurf* (*Toward Perpetual Peace: Sebuah Konsep Filosofi*, 1795) dan *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (*The Groundwork for the Metaphysics of Morals*, 1785).

1.8 Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan diuraikan dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, pembatasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II akan diawali dengan membahas biografi singkat Kant dan perjalanan intelektualnya. Di bab ini akan diuraikan juga mengenai latar sejarah Pencerahan dan Revolusi Prancis yang mempengaruhi filsafat politik Kant dalam *Zum Ewigen Frieden: Ein Philosophischer Entwurf* (Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofi, 1795).

Bab III akan menguraikan para pemikir di sekitar zaman Kant, seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau. Ketiga pemikir ini telah menginspirasi filsafat politik Kant, bahkan Kant meradikalkan filsafat politik Hobbes, Locke, dan Rousseau untuk membangun model baru bentuk pemerintahan emansipatoris sayap kiri. Kant memberikan kerangka etis dalam bangunan politiknya dengan cara menjembatani hukum dan moral dalam kerangka besar republik dan kepublikan.

Bab IV adalah bagian inti dari tesis ini. Di bab 4 ini, saya akan memaparkan dua prinsip etika politik Kant, yaitu republik dan publisitas untuk menjamin kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk melihat prinsip-prinsip republikanisme dan posisi penting paham publisitas yang menjembatani antara politik dan moral.

Bab V adalah bagian penting dari tesis ini karena akan memberikan kesimpulan etika politik Kant secara menyeluruh, dan relevansinya di sekitar pemikiran politik kontemporer. Tetapi juga, secara lugas akan menimbang berbagai pemikiran Kant, baik yang problematis seperti liberalisme, maupun menimbang teori etika politik Kant yang dapat dijadikan inspirasi, yaitu negara hukum yang secara total menjunjung hak milik warga negara.

Bab VI, saya akan menyimpulkan dan menjawab tiga pertanyaan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah di bab I. Pada bagian akhir saya akan memberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

PUSTAKA PRIMER

Kant, Immanuel, *Perpetual Peace: A Philosophical Essay*, Smith, Campbell M.A (terj.), New York: The Macmillan Company. 1795.

_____ *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*, (terj.) Harun A. & Setiadi H. (terj.), Jakarta: Mizan, 2005.

_____ *Critique of Pure Reason*, Guyer, Paul E., and Wood, Allan W. (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

_____ *Groundwork the Metaphysical of Moral*, Wood, Allan W. (ed. and trans.), New Yorke: Yale University Press, 2002.

_____ *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*. Bandung: Mizan, 2005.

_____ *Kritik der reinen Vernunft*, Meiklejohn, J.M.D (trans.), London: George Bell and Son, 1887.

_____ *Critique of Practical Reason*, Gregor, Marry (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

_____ *Groundwork of the Metaphysics of Moral*, Gregor, Marry (ed.), Cambridge: University of Cambridge, 1997.

_____ *The Metaphysics of Morals*, Gregor, Marry (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

_____ "On the Common Saying: This May Be True in Theory, but It Does Not Hold in Practice" dalam Kleingeld, Pauline (ed.), *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*. Yale: Yale University Press, 2006.

_____ *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, Wood, Allan W. (ed.), London: Yale University Press, 2002.

PUSTAKA SEKUNDER

- Berkowitz, Peter, *Virtue and the Making of Modern Liberalisme*, Princeton: Princeton University, 1999.
- Cassirer, Ernst, *Kant's life and Thought*, Haden, James (trans.), New York: Yale University Press, 1981.
- Dagger, Richard, "Republican Citizenship." dalam *Handbook of Citizenship Studies*, edited Engin F., Isin & Turner, Bryan S., (ed.), Thousand Oaks: Sage Publications, 2000.
- Erwin, Terance, *The Development of Ethics: A Historical and Critical Study, Volume III: From Kant to Rawls*, (N Sarah Holtman, "Autonomy and the Kingdom of Ends Autonomy" T.E.Hill. JR. (ed) *The Blackwell Guide to Kant's Ethics*, Chichester: Blackwell Publishing Ltd., 2009.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press, 1989.
- Hobbes, Thomas, *Leviathan, with an Essay: The L W.G. Pogson Smith*, Oxford: Clarendon Press, 1965.
- Habermas, Jürgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Burger, T. and Lawrence, Frederick (trans.), Cambridge: MIT Press, 1991.
- Howard Williams, *Kant's Political Philosophy*, Hardani, Muhammad (terj.), Surabaya: JP-Press, 2003.
- Hocking, William E. *The Lasting Elements of Individualism*, USA: Yale University Press, 1937.
- Honan, Iseult, *Civic Republicanism*, New York: Routledge, 2002.
- Johnson, N. Robert, "Good will and the Moral Worth of Acting from", dalam Thomas E. Hill, Jr. (ed.) *The Blackwell Guide to Kant's Ethics*, Chichester: Blackwell Publishing Ltd., 2009.

- Kleingeld, Pauline, “Kant on Politics, Peace, and History”, dalam Colclasure, L. David (terj.), *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*, London: Yale University Press, 2006.
- Kuehn, Manfred, *Kant: A Biography*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Laursen, John C. *The Politics of Scepticism in the Ancients Montaigne, Hume and Kant*, Belanda: Brill, 1992.
- Mounk, Yascha, *The People Vs. Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save It*. Cambridge: Harvard University Press, 2018.
- Mouffe, Chantal, *The Democratic Paradox*, New York: Verso, 2000.
- MacIntyre, Alasdair, *Ethics and Politics: Selected Essays, Volume 2*, New York: Cambridge University Press, 2006.
- Mitter, Swasti, *Gender and the Digital Economy: Perspective from the Developing World*, Ng, Cecilia and Mitter, Swasti (ed.), India: Sage Publication, 2005.
- Priyono, Herry, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta: Kompas Gramedia 2018.
- _____ “Demokrasi”, “Bahan Kuliah Matrikulasi STF Driyarkara”, 2019.
- _____ “Thomas Hobbes: Leviathan sebagai Teori Tata Negara”, dalam *Bahan Kuliah Program Pascasarjana STF Driyarkara*, 2019.
- Reiss, Hans, (ed.) *Kant Political Writing*, Nisbet, H.B. (trans.), New York: Cambridge University Press, 1991.
- Richard Dean, “The Formula of Humanity as an End in Itself”, T.E.Hill. JR. (ed) *The Blackwell Guide to Kant’s Ethics*, (Chichester: Blackwell Publishing Ltd., 2009.
- Robert, Robertus, *Republikanisme: Filsafat politik untuk Indonesia*, Jakarta: Marjin Kiri, 2021.

Samuel J. Kerstein, “Deriving the Supreme Moral Principle from Common Moral Ideas”, dalam T.E.Hill. JR. (ed) *The Blackwell Guide to Kant’s Ethics*, Chichester: Blackwell Publishing Ltd., 2009.

Sudarminta, J. “Persoalan ‘Publik dan ‘Privat dalam Feminisme”, dalam *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Tjahjadi, Lili S.P, “Kepublikan dalam Filsafat Kant”, dalam Hardiman, Budi F (ed.), *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace* 2010.

Tjahjadi, Lili S.P, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Tjahjadi, Lili S.P, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Wood, W. Allan, *Kant’s Ethical Thought*, Cambridge: Cambridge Press, 1999.

Jurnal

Rizky, Prasetyo, *Determinasi Demografi Penggunaan Internet Petani Padi di Indonesia dan Kaitannya dengan produktivitas*, dalam Seminar Nasional Official Statistic, 2021, hlm. 69-167, diakses 11 Juni, 2023, pukul 15:47

Eric Watkins and William Fitzpatrick, “O’Neill and Korsgaard on the Construction of Normativity,” Dalam, *The Journal of Value Inquiry* no. 36, 2002.

Internet

Internet

Badan Pusat Statistik, *Proporsi Individu yang Menggunakan Internet Menurut Jenis Kelamin (persen) 2017-2019*: <https://www.bps.go.id/indicator/27/1227/1/proporsi-individu-yang-menggunakan-internet-menurut-jenis-kelamin.html>. diakses 12 Juni, 2023, pukul: 05.16. Kompas, “Pertama Kali Perempuan Punya Hak Pilih” (oleh Arrum Strisni Putri).

Britanica, “Kant -Laplace Nebular Hypothesis: <https://www.britannica.com/science/Kant-Laplace-nebular-hypothesis>.

Stanford Encyclopedia: Jean Jacques Rousseau, diakses dalam, <https://plato.stanford.edu/entries/rousseau/>, diakses Kamis, 6 April, pukul, 19:45

Britanica, “French Revolution”, dalam: <https://www.britannica.com/event/French-Revolution>.

CNBC: “Australia passes new media law that will require Google, Facebook to pay for news”,<https://www.cnn.com/2021/02/25/australia-passes-its-news-media-bargaining-code.html>.

Dalam: <http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/ewatkins/Papers/JVI.pdf>, diakses pada 19 Maret 2023, pukul 18.23.

Library of Congress, *Women in the French Revolution: From the Salons to the Streets*, dalam:<https://blogs.loc.gov/international-collections/2020/07/women-in-the-french-revolution-from-the-salons-to-the-streets/>.

Wikipedia, dalam “Women’s Suffrage” dapat diakses https://en.m.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage, diakses pada Jumat, 2
Wikipedia, dalam “Women’s Suffrage” dapat diakses https://en.m.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage.

Youtube, dalam, “Mengawal Konstitusional Arah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” PSHK FH UI.

YouTube, Intilijen Langit, “Prof. Susi D. H., Menjelaskan Due Process of Law“, diakses pada 11 September, 2023.

